



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan perencanaan pembangunan desa dipandang perlu menyusun pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 327**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam perencanaan pembangunan desa dan memberikan acuan teknis proses penyusunan perencanaan pembangunan desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

1.3. Pengertian

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
13. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
16. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

19. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa, 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1.4. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa adalah:

- a. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa- RKP Desa;
- b. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa - RKP Desa;
- c. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukan kekuatan dan Kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa;
- d. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa, dan
- e. Mendorong terwujudnya RPJM Desa-RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

2.1. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.

2.2. Prinsip Penyusunan RPJM-Desa

Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Lengkap artinya RPJM-Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa,
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
- c. Sistematis artinya RPJM-Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan,
- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Desa.

2.3. Kaidah Penyusunan RPJM-Desa

2.3.1 RPJM-Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis

RPJM-Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan.

Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan:

- a. Tujuan dan sasaran pembangunan desa yang
 - Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur, dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan
 - Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.
- b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat
- c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien
- d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
- e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan, dan
- f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.

2.3.2. RPJM-Desa sebagai Proses Berkelanjutan

RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM-Desa harus:

- a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa
- b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan
- c. Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi
- d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

2.3.3. RPJM-Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis
Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis. Tahapan dimaksud adalah :

- a. Persiapan
- b. Identifikasi para pihak pemangku kepentingan
- c. Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa
- d. Pengkajian potensi, masalah dan daya dukung
- e. Perumusan tujuan
- f. Perumusan program dan kegiatan
- g. Penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan
- h. Perumusan alat ukur pencapaian tujuan

2.4. Tim Penyusun RPJM-Desa

2.4.1 Jumlah anggota dan Unsur Tim Penyusun Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (Sebelas) orang, yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan.
- d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan.
- e. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala dusun, dan
- f. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah perempuan

2.4.2 Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
- b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan.
 - 1) Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - Rencana penyusunan RPJM-Desa
 - Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa.
 - 2) Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
 - Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun
 - Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun
 - Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.
 - 3) Pemilihan anggota Tim Penyusun
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.

2.4.3 Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa

- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
- b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - 1) Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Desa adalah :
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
 - Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
 - 2) Pelaksanaan/Proses rapat
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa
Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:
 - (1) Pembukaan
 - (2) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM-Desa; (b) Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
 - (3) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
 - (4) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa.
Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

2.4.4 Kedudukan tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Mengundang anggota Tim Penyusun
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa
- b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat

- Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa
- c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Menghadiri rapat Tim Penyusun
 - Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa

2.4.5. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pernerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setiawan (kecamatan danhatau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

2.4.6. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perdes tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa kepada BPD.

2.5. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa

2.5.1 Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah

- a. Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD
- b. Memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa
- c. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa
- d. Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDD dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa
- e. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
- f. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.

2.5.2 Pelaksanaan

2.5.2.1 Pengkajian Keadaan Desa

2.5.2.1.1 Pengertian

Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

2.5.2.1.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:

- a. Potensi desa
- b. Permasalahan yang dihadapi
- c. Kebutuhan masyarakat

2.5.2.1.3 Fasilitator

Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD

2.5.2.1.4 Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisilitatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).

2.5.2.1.5 Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah sebagaimana contoh **Format A** dan **Format B**.

2.5.2.1.6 Proses

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- b. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- c. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- d. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan

2.5.2.1.7 Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kabutuhan desa yang bersangkutan.

2.5.2.1.8 Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- a. Data Potensi Desa
- b. Data Permasalahan
- c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan instrumen yang digunakan adalah sebagaimana contoh **Format C**.

2.5.2.2 Penyusunan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.2.1 Rancangan RPJM-Desa

Rancangan RPJM-Desa dimaksud, terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa, dan (2) Rencana kegiatan pembangunan desa.

2.5.2.2.2 Sistematika/Tata Susun

Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika sebagaimana contoh **Format D**

2.5.2.2.3 Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan desa

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana contoh **Format E**.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana, (4) Lingkungan hidup, (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelautan.

- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

2.5.2.2.4 Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa langkah sampai tersusun Rancangan RPJM-Desa yang lengkap dan layak
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
- i. Rapat Pleno
 - Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa
 - Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
 - Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
 - Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
 - Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

2.5.2.2.5 Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Desa.

2.5.2.2.6 Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Desa

2.5.2.3 Pembahasan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.3.1 Forum Pembahasan

- a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.
- b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam

5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Desa.

2.5.2.3.2 Peserta

- a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah
 - Tim Penyusun
 - Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM
 - Wakil kelompok perempuan
 - Wakil masyarakat miskin
 - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu

2.5.2.3.3 Fasilitator

Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.

2.5.2.3.4 Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun
- d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa
- e. Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun
- f. Pembahasan oleh peserta
 - Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
 - Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
 - Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- i. Penutupan oleh Kepala Desa

2.5.2.3.5 Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Desa.

2.5.2.4 Penetapan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.4.1 Forum Penetapan

- a. Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD, yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.

2.5.2.4.2 Peserta Rapat

Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa adalah

- Semua Anggota BPD
- Kepala Desa

- Sekretaris Desa
- Semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa
- Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa
- Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- Pengurus Ormas dan/atau LSM
- Unsur masyarakat lainnya

2.5.2.4.3 Sifat Rapat

Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM-Desa bersifat terbuka untuk umum

2.5.2.4.4 Penetapan/Pengesahan

Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes)

2.5.2.4.5 Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan

2.5.2.4.5.1 Pengajuan Rancangan Perdes

Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Desa

2.5.2.4.5.2 Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa
- b. Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa diterima.

2.5.2.4.5.3 Proses Rapat Penetapan

- a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- c. Tanggapan Anggota BPD
- d. Jawaban Kepala Desa
- e. Pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes tentang RPJM-Desa
- f. Penandatanganan naskah Persetujuan Bersama oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

2.5.2.4.5.4 Hasil

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana contoh **Format F**.

2.5.3 Pelembagaan

Kegiatan Pelembagaan dilaksanakan melalui permasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa, antara lain melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

2.6. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBDesa
- c. Swadaya Masyarakat.
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-Desa)

3.1. Tujuan

Penyusunan RKPD bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- d. Menetapkan kerangka pendanaan

3.2. Tim Penyusun

3.2.1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun

- a. Pembentukan Tim Penyusun dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa
- b. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

3.2.2. Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun

- a. Jumlah anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang
- b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPMD.

3.3. Matrik RKP Desa

RKP Desa disusun sesuai dengan matrik DU-RKP-Desa sebagaimana contoh **Format G.**

3.4. Penetapan

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

3.5. Hasil

Dokumen RKP-Desa terdiri dari Peraturan Kepala Desa, DU-RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa. Surat Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa sebagaimana contoh **Format H.**

BAB IV PENGENDALIAN

4.1. Pelaporan

- a. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan tentang penyusunan RPJM-Desa dan Perdes Tentang RPJM-Desa kepada Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Laporan dimaksud selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

4.2. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi;
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat didelegasikan kepada Camat.

4.3. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJM-Desa.

Secara umum pemantauan atau monitoring dimaksud, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

4.3.1. Pemantauan Internal

Kegiatan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berkompeten, dilakukan dengan cara:

- Memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan
- Memeriksa dokumen
- Melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- Menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten.

4.3.2 Pemantauan Eksternal

- Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur pemerintah, yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJM-Desa.
- Monitoring oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif
- Pihak-pihak dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten.

BAB V

PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA DAN RKP-DESA

5.1. Tujuan

Menilai dan mengevaluasi secara jelas dan objektif:

- a. Ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJM-Desa dan RKPD
- b. Ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa
- c. Pencapaian tujuan pembangunan desa

5.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi mencakup:

- a. Kelayakan dokumen
- b. Kualitas proses
- c. Ketepatan Perumusan/Kualitas Proses Pemikiran Strategis
- d. Ketepatan perumusan
- e. Kualitas RPJM Desa
- f. Kualitas RKPD
- g. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan
- h. Keterpaduan

5.3. Instrumen

Format instrumen/alat ukur penilaian dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana **Format I**.

5.4. Tata Cara Penilaian

- a. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan
- b. Setiap Indikator memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
- c. Rentang nilai Skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100.
- d. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek Sub aspek tertentu dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali bobot (Aspek)
- e. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator.
- f. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
 - ≤ 55 : Tidak layak
 - 56-59 : Kurang
 - 60-65 : Cukup
 - 66-74 : Layak
 - 75-90 : Memuaskan

5.5. Pengguna

Instrument penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh:

- a. Pemerintah desa
- b. Pemerintah kecamatan
- c. Pemerintah kabupaten, dan
- d. Pihak lain yang berkepentingan

BAB VI PENUTUP

Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam rangka menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM DESA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian wilayah desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan
- 4.4. Sasaran
- 4.5. Strategi
 - 4.5.1. Kebijakan
 - 4.5.2. Program
 - 4.5.3. Kegiatan

BAB V PENUTUP

Lampiran:

- 1. Peta Sosial Desa
- 2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah
- 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa

PERUMUSAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Provinsi Kecamatan Kabupaten Desa

No	Uraian	Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Perkiraan Biaya	Tahun Pelaksanaan

- Catatan:
- 1. Kolom "Kegiatan" diisi dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses pengkajian keadaan desa berdasarkan "urusan".
 - 2. Urusan dimaksud adalah Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
 - 3. Urusan Wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa. Mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi & Usaha Masyarakat.
 - 4. Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat. Mencakup: Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kelautan.
 - 5. Kegiatan sarana prasaran yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan, yaitu: pembangunan Polindes, Posyandu, Pos Obat Desa, Saluran Pembuangan Limbah, MCK,dll, termasuk dalam urusan wajib kesehatan.
 - 6. Kegiatan sarana prasaran yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan, yaitu: pembangunan/rehab gedung sekolah, perpustakaan, dll, termasuk dalam urusan wajib pendidikan.
 - 7. Pembangunan/rehab pasar desa termasuk dalam urusan wajib sarana prasarana.

INSTRUMEN PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM DESA

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
1	Kelayakan Dokumen	10	Kelengkapan Dokumen Perencanaan	Tersedia data potensi, masalah dan kebutuhan desa hasil pengkajian keadaan desa/ MMDD	30		
				Tersedia peta social desa	30		
				Tersedia dokumen RPJM Desa (lengkap dan dijilid)	10		
				Tersedia dokumen RKP Desa TA yang bersangkutan	30		
			Keabsahan Dokumen Perencanaan	Tersedia Perdes tentang PRJM Desa	60		
				Tersedia SK. Kades tentang RKP Desa	40		
2	Kualitas Proses	20	Penyusunan	Rancangan RPJM Desa disusun oleh Tim Perumus/ Penyusun	10		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
				Rancangan RPJM Desa disusun sesuai sistematika yang ditetapkan	20		
				Rancangan kegiatan disusun sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007	20		
				Narasi RPJM Desa disusun secara jelas, baik ide/ substansi materi maupun dari segi bahasa	50		
			Pembahasan	Rancangan RPJM Desa dibahas dalam Forum Musrenbang	40		
				Tersedia risalah/ notulensi hasil pembahasan	20		
				Dilakukan revisi/ penyempurnaan sesuai hasil pembahasan	40		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
			Penetapan	Penetapan Perdes tentang RPJM Desa dilakukan dalam forum Rapat BPD	40		
				Draft RPJM Desa dibagikan kepada peserta Rapat (BPD)	10		
				Terjadi perubahan/ penyempurnaan draft sesuai keputusan rapat	30		
				Tersedia risalah/ notuilensi hasil rapat BPD	20		
3	Ketepatan Perumusan	20	Kualitas Proses Pemikiran Strategi	Visi dirumuskan secara tepat dan jelas	20		
				Perumusan misi konsisten dengan rumus visi	15		
				Tujuan dirumuskan secara terarah dan jelas	20		
				Kebijakan pembangunan desa dirumuskan secara jelas dan terarah	20		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
				Rumusan “program” tidak rancu dengan “kegiatan”	15		
				Perumusan kegiatan konsisten dengan rumusan program	15		
4	Kualitas RPJM Desa	20	Isi	Materi RPJM Desa mencakup semua urusan wajib sesuai Tabel Rencana	10		
				Terdapat analisis dan rumusan yang jelas tentang potensi desa	30		
				Terdapat analisis dan rumusan yang jelas tentang permasalahan desa	30		
				Prioritas pembangunan dirumuskan secara jelas dan konsisten	30		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
5	Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan	20	Persiapan	Rencana pelaksanana Musrenbang diinformasikan kepada masyarakat luas secara terbuka	20		
				Tersedia daftar peserta yang akan diundang	10		
				Tersedia jadwal dan agenda acara	10		
				Tersedia bahan-bahan (materi) Musrenbang	30		
				Tersediaan panduan fasilitas proses Musrenbang dan tatacara pembahasan	30		
			Pelaksanaan	Musrenbang diikuti oleh berbagai unsur dan kelompok masyarakat	20		
				Perempuan, Keluarga Miskin dan Kelompok Marjinal lainnya terwakili secara proporsional	20		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
				Pembahasan agenda dilakukan secara terbuka dan tidak didominasi peserta tertentu	30		
				Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis (terbuka dan melibatkan semua peserta)	30		
			Hasil	Hasil/ keputusan Musrenbang jelas dan diketahui oleh peserta	50		
				Hasil/ keputusan Musrenbang ditetapkan dengan Berita Acara	50		

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
6	Keterpaduan	10	Keterpaduan Perencanaan	Terjadi keselarasan waktu (pelaksanaan Musyawarah Desa/ MD menyatu dengan Musrenbangdes dan Musyawarah Antar Desa/ MAD menyatu dengan Musrenbang Kecamatan)	20		
				Terjadi sinergi kegiatan antar Program Nasional, local dan Desa sesuai RKP Desa	20		
				Terjadinya sinergi Renja dengan hasil Musrenbang Kecamatan (musrenbang Kecamatan sebagai salah satu rujukan penyusunan Renja SKPD)	30		
				Terjadi sinergi antara jaring	30		

				asmara dengan hasil Musrenbang Kecamatan			
--	--	--	--	---	--	--	--

No	Aspek	Bobot %	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot %	Skor	Skor Tertimbang
			Keterpaduan anggaran	Terjadi keterpaduan anggaran yang bersumber dari swadaya ADD/APP Desa, Program (BLM)	40		
				Ada dukungan dana dari sumber lain	30		
				Terdapat kegiatan sesuai RKP Desa yang diserap/ dibiayai APBD	30		
				Total Nilai			